



**UPAYA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(DISDALDUK-KB) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PESERTA  
KELUARGA BERENCANA (KB) AKTIF**

**SKRIPSI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH:**

**TASYA DWI ATMA**  
**NIM. 11675202550**

**PROGRAM S1**

**ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2020**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: TASYA DWI ATMA

: 11675202550

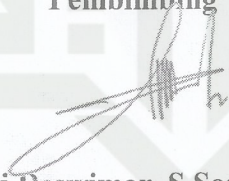
FAKULTAS / JURUSAN

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL / ILMU ADMINISTRASI  
NEGARA

: UPAYA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA (DISDALDUK-KB) KOTA  
PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PESERTA  
KELUARGA BERENCANA (KB) AKTIF

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Devi Deswimar, S.Sos, M.Si

NIK. 130 411 027

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Program Studi,  
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NAMA

NIM

FAKULTAS

PROGRAM STUDI

JUDUL SKRIPSI

HARI/TANGGAL

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: TASYA DWI ATMA

: 11675202550

: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

: UPAYA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISDALDUK-KB) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) AKTIF

: 10 AGUSTUS 2020

PANITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui:

PENGUJI I

Dr. Mustiqowati UF, M.Si  
NIP. 19791127 200801 2 010

PENGUJI II

Rony Jaya, S.Sos, M.Si  
NIK. 130 717 060

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISDALDUK-KB) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) AKTIF**

**TASYA DWI ATMA  
NIM. 11675202550**

**Email : tasyadwiatma99@gmail.com**

*Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Kota Pekanbaru di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Ketertarikan Peneliti untuk Melakukan Penelitian dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif dan untuk mengetahui kendala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif. Jenis penelitian dalam Skripsi ini adalah Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas serta Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Pekanbaru, kemudian untuk memperkuat Hasil Penelitian ini peneliti mengambil beberapa masyarakat yang mewakili dari seluruh masyarakat yang menjadi peserta Aktif KB dan Pasangan Usia Subur (PUS) sasaran KB Aktif di Kota Pekanbaru. Pengolahan data dari hasil wawancara dengan menggunakan observasi serta Analisis dengan Analisis Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil Pengelolaan data dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar program KB telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan ketetapan dari Peraturan Pemerintah. Namun dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi lebih luas dan jelas.*

**Kata Kunci: Kebijakan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Peserta KB Aktif,**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'Ala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kesehatan tiada henti- hentinya. Memberikan kesabaran dan kegigihan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallahu Alahiwasalam yang menjadi suritauladan dan uswatun hasanah utusan Allah sehingga umatnya terhindar dari buta ilmu pengetahuan. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu Wata'Ala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. kedua Orang Tua, Ayahanda Yen Helfi dan Ibunda Nurti Elisna yang senantiasa membimbing, memberikan kasih sayang dan do'a kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial semoga menjadi Fakultas teladan dan terbaik di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial semoga menjadi Jurusan teladan dan terbaik di Uin Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku pembimbing seminar proposal, dan pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau.
6. Bapak/Ibu Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data terkait penelitian.
7. Teman – teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2016 terkhusus lokal B yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Sahabat – sahabat tercinta yang sudah seperti keluarga yang selama ini selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan dan menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung sehigga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wata'Ala penulis serahkan segalanya serta do'a tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Pekanbaru 10 Juli 2020

Penulis

**TASYA DWI ATMA**  
**NIM. 11675202550**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Penelitian .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	13
2.2 Pengendalian Penduduk .....	18
2.3 Program Keluarga Berencana (KB).....	23
2.4 Upaya Kebijakan Keluarga Berencana harus disertai dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) .....	27
2.5 Penelitian Terdahulu.....	32
2.6 Pandangan Islam Terhadap Keluarga Berencana .....	34
2.7 Defenisi Konsep .....	38
2.8 Kerangka Pemikiran .....	39



2.9	Indikator Penelitian .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>41</b>
3.1	Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	41
3.2	Jenis Penelitian .....	41
3.3	Sumber Data Penelitian .....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5	Informan Penelitian .....	43
3.6	Analisis Data .....	44
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>46</b>
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	46
4.2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru .....	49
4.3	Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru .....	64
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>64</b>
5.1	Kebijakan Pemerintah dan Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) Kota Pekanbaru .....	64
5.2	Kendala – kendala Dinas Pengendalian Penduduk dalam Meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di Kota Pekanbaru .....	85
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>89</b>
6.1	Kesimpulan .....	89
6.2	Saran .....	91

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2014 – 2018 .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 2.2 Konsep Operasional .....	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	44
Tabel 5.1 Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana (PPKB) berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2019 .....	77
Tabel 5.2 Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2019 .....	79
Tabel 5.3 Model Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Keluarga Berencana .....	82
Tabel 5.4 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif di Kota Pekanbaru tahun 2019 .....	84

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB Aktif (PA), Angka Kelahiran di Kota Pekanbaru tahun 2015- 2019 .....	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	40
Gambar 5.1 DISDALDUK-KB Kota Pekanbaru gelar sosialisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga .....	70
Gambar 5.2 Kegiatan TNI Manunggal KB KES .....	72
Gambar 5.3 DISDALDUK-KB Kota Pekanbaru menggelar pertemuan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Pekanbaru .....	75

UIN SUSKA RIAU





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Puyuh No. 2 Telp/Fax. (0761) 23019

Email : daldukkb.pekanbaru@gmail.com

PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN

Nomor :800/DISDALDUKKB/403/2020

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala DISDALDUK KB Kota Pekanbaru  
Menerangkan Bahwa :

1. NAMA : TASYA DWI ATMA  
NIM : 11675202550  
PORGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

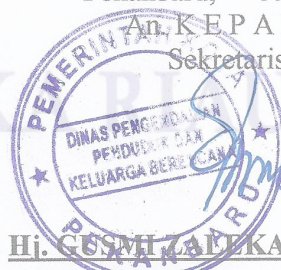
Yang tersebut diatas benar telah melakukan Riset/Penelitian guna menyusun  
Skripsi pada Tanggal 26 Juni-17 Juli 2020 dengan Judul “Analisis Kebijakan Dinas  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru (DISDALDUK-  
KB) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB)  
Aktif.”.

Demikian surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Juli 2020

An. KEPALA

Sekretaris



Hj. GUSMI ZALKA, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19620119 198603 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk terus diatasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Selain itu, disebutkan juga dalam undang-undang tersebut bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

Secara garis besar terdapat tiga aspek permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu struktur usia muda, kualitas kependudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata (BKKBN, 2013). Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan dan keamanan. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk Indonesia di beberapa provinsi merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Indonesia merupakan salah satu negara dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 265 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,33%. Sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 262 juta jiwa. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tinggi atau belum ideal. Menurut BKKBN laju pertumbuhan Penduduk Indonesia yang ideal adalah 0,5% pertahunnya. Dan Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat (loka data:2017). Seperti halnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018**

Tahun	Jumlah Penduduk
2014	1.011.467 jiwa
2015	1.038.118 jiwa
2016	1.064.566 jiwa
2017	1.091.088 jiwa
2018	1.117.359 jiwa

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru*

Berdasarkan Tabel 1.1 Kota Pekanbaru Mengalami peningkatan Jumlah penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk kota Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 1.352.136 jiwa, pada tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak 1.038.118 jiwa, pada tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 1.064.566 jiwa , pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 1.091.088 jiwa dan pada tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 1.117.359 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016-2017 sebesar 2,49% dan pada tahun 2018 jumlah penduduk mengalami peningkatan yaitu menjadi 1.117.359 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2017-2018 sebesar 2,70%. Angka tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di kota Pekanbaru diatas rata-rata nasional yaitu 2,3%.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah yang cukup serius apabila tidak segera mendapat pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Jika jumlah kelahiran tinggi, maka kesejahteraan penduduk akan rendah yang disebabkan oleh semakin banyaknya beban yang akan ditanggung oleh kepala keluarga. Mantan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarif, dalam sebuah harian media massa nasional menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat. Apabila tidak ada intervensi pemerintah dalam meningkatkan program Keluarga Berencana, Ledakan penduduk niscaya tidak dapat dikendalikan lagi.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui Program Keluarga Berencana, Sebagaimana telah diketahui di dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa: Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pemerintah Kota Pekanbaru terus berusaha untuk menekan laju pertumbuhan yang tinggi dengan melakukan program Keluarga Berencana yang dinaungi oleh Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota Pekanbaru serta Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1)Pengendalian Penduduk, 2)Keluarga Berencana (KB), 3)Keluarga Sejahtera, serta 4)Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan program KB Nasional/BKKBN, maka keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu urusan wajib pemerintah diantaranya penanganan bidang kesehatan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, pelayanan kependudukan dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang Undangan. Dengan demikian Peraturan Pemerintah RI tersebut menegaskan bahwa keluarga berencana dan keluarga sejahtera merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan program KB.

Fertilitas yang tinggi dapat memengaruhi jumlah pertumbuhan penduduk. Menurut Mantra (2015: 145), fertilitas berarti terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan. Tingginya tingkat fertilitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah usia perkawinan pertama dan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS). Usia perkawinan pertama seorang perempuan memengaruhi panjangnya masa melahirkan sehingga dapat meningkatkan jumlah fertilitas. Selanjutnya semakin banyaknya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) akan memperbesar peluang banyaknya kelahiran. Oleh karena itu, banyaknya jumlah anak juga akan memperbesar tanggungan kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Dengan demikian, pembatasan

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

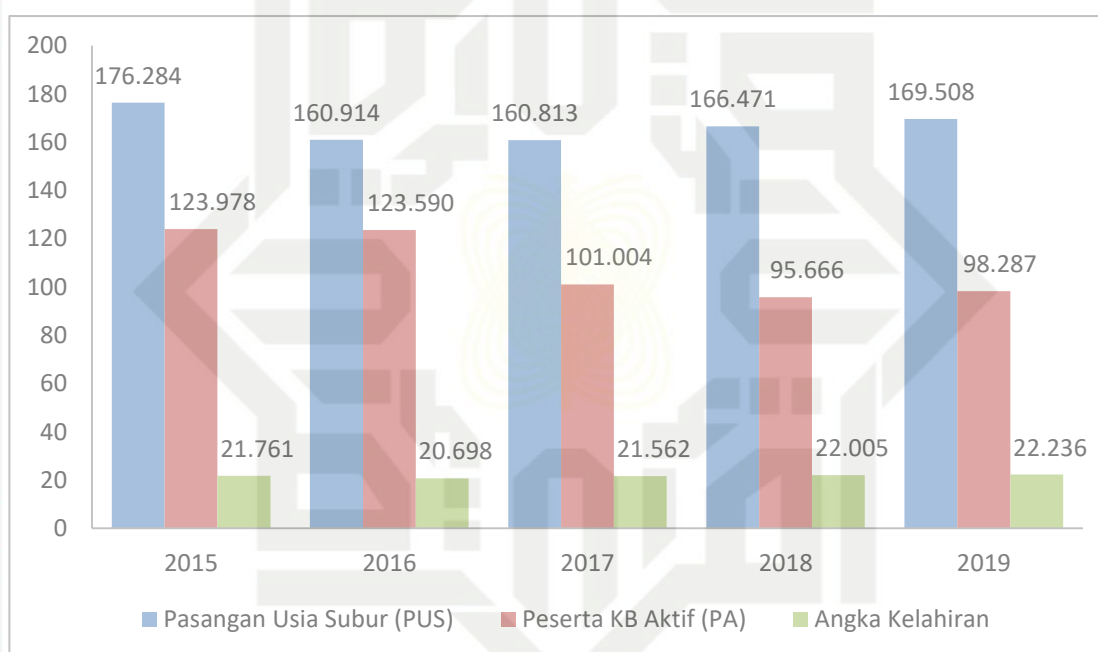
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah anak perlu diperhatikan agar tercapai keluarga yang sejahtera. Oleh sebab itu sasaran dari kebijakan Keluarga Berencana ini adalah meningkatkan Peserta KB Aktif.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Peserta KB Aktif (PA) dan Angka Kelahiran di Kota Pekanbaru tahun 2015-2019**



**Sumber:** Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 jumlah Peserta KB aktif di Kota Pekanbaru pada tahun 2015 yaitu 123.380 jiwa dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 176.284 dan angka kelahiran 21.761 jiwa, namun pada tahun 2016 Peserta aktif KB mengalami penurunan yaitu 123.590 dari PUS 160.914 dan angka kelahiran mengalami penurunan yaitu 20.689 jiwa. Akan tetapi, pada tahun 2017 jumlah peserta KB Aktif kembali mengalami peningkatan yaitu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

101.004 jiwa dari PUS 160.813 dan angka kelahiran mengalami peningkatan yaitu 21.562 jiwa. Namun pada tahun 2018 Jumlah peserta KB Aktif di kota Pekanbaru mengalami penurunan yaitu 95.666 jiwa dari PUS 166.471 dan angka kelahiran 22.005 jiwa. Ditahun 2019 jumlah peserta KB Aktif mengalami peningkatan yaitu 98.287 dari Jumlah PUS 169.508 namun angka kelahiran masih relatif tinggi yaitu 22.236 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Terlihat data dari Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru terjadi penurunan Peserta KB Aktif dari tahun 2017 hingga 2018, sehingga pada tahun 2018 Peserta KB Aktif menurun dari 101.004 jiwa ditahun 2017 menjadi 95.666 jiwa dari 166.471 Pasangan Usia Subur (PUS) di tahun 2018. Sehingga mengakibatkan angka kelahiran (Fertilitas) pada tahun 2018 meningkat menjadi 22.005 jiwa dibandingkan tahun 2017 sebanyak 21.562 jiwa.

Untuk mewujudkan terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga pemerintah memberi peran dan tugas kepada Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru sebagai bentuk kegiatan mengendalikan kependudukan dan peningkatan kualitas kesehatan reproduksi yang didalamnya menyangkut peningkatan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (khiba), pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas (pekarpi), kembalinya masa kesuburan pasca pengguna alat kontrasepsi, dan meningkatkan Norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dengan melihat nilai



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

– nilai agama dan sosial. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tujuan pokok dan fungsi dalam ikut serta dan melaksanakan program KB (Keluarga Berencana) untuk mengendalikan kependudukan yang ada di Kota Pekanbaru disertai Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan memberikan penerangan, penyuluhan, dan pengetahuan kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, pertemuan penyuluhan, pendidikan, dan lain – lainnya.

Berbagai langkah dan Program yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru seperti Program Pencanangan IBI KB KES (Ikatan Bidan Indonesia Keluarga Berencana Kesehatan) dengan agenda Program tersebut KB gratis, Sosialisasi Kontrasepsi, Pemeriksaan HIV/Aids, Program TNI Manunggal KB KES dimana menjadikan sasaran Pelayanan KB kepada PUS (Pasangan Usia Subur) yang belum menjadi Peserta KB Aktif, Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Kependudukan), Kampung KB dan Program Sosialisasi Pendewasaan Perkawinan dengan Usia minimal 25 tahun.

Berdasarkan uraian di atas adanya kebijakan, strategi, dan upaya yang optimal untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), angka kelahiran total (TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), menurunnya Angka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun), serta menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun).

Maka berdasarkan Fenomena diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif”**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat di rumuskan suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif?
2. Apa saja kendala atau hambatan Dinas Pengendalian Penduduk dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif di Kota Pekanbaru?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif

**1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi atas 2 manfaat, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

- b. Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari suatu karya ilmiah

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi masukan positif dan manfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam melaksanakan programnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan skripsi ini, serta fokus kajian penelitian tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari buku, review, jurnal, publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan Islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep operasional/definisi konsep/variabel penelitian/hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan metode analisis.

### BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian.

### BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Harold Lasswell dan Abraham Kaplan (dalam Nugroho, 2008:53) mengatakan bahwa kebijakan sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values and practices*). Sedangkan menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) mengatakan bahwa :

“kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Dalam Buku Pasolong, (2008:39) Kebijakan Publik menurut William N. Dunn: 1994 adalah :

“suatu rangkaian pilihan–pilihanyang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain lain.”

Selanjutnya tentang kebijakan publik menurut Dye dalam Arifin Tahir (2014:25) mengemukakan kebijakan publik adalah :

“apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata – mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suharto (2008:3) kebijakan (policy) adalah :

“sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya mengatur aparatur negara, melainkan juga governance yang menyuruh pengelola sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan– keputusanatau pilihan – pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan atau teori, ideologi dan kepentingan – kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.”

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan berorientasi pada tujuan yang telah ditentukan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan perundang–undangan, sasaran dari program – program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor.

Maka kebijakan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah suatu pilihan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dengan tujuan meningkatkan Peserta KB Aktif sehingga menurunkan Fertilitas, tingkat Mortalitas, Pendewasaan usia perkawinan dan Pemerataan Program KB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.1. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses – proses penyusunan kebijakan publik tersebut yaitu Willian Dunn (2003:25) adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Pada tahap penyusunan agenda ini, harus ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Dunn (2003:247) Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang menghasilkan dan menguji konseptualisasi-konseptualisasi alternatif atas suatu kondisi masalah, yang meliputi empat fase yang saling tergantung, yaitu : pencarian masalah (*problem solving search*), pendefinisian masalah (*problem definition*), spesifikasi masalah (*problem specification*) dan pengenalan masalah (*problem sensing*). Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).

#### 2. Formulasi Kebijakan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik

### 3. Adopsi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan (dalam Abidin, 2004:169) merupakan saran yang disampaikan kepada yang berwenang mengambil kebijakan untuk melakukan suatu aksi kebijakan guna memecahkan atau mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (*a desired objective*). Penyampaian saran atau rekomendasi kebijakan dilakukan dengan bersahaja berdasarkan suatu kajian yang spesifik. Artinya, alternatif yang dipilih untuk disarankan telah dihitung nilai lebihnya dibandingkan dengan berbagai alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Perbandingan antara nilai-nilai yang diperhitungkan itu meliputi efisiensi, efektifitas, kepatutan, adil dan lain-lain, baik yang berkenaan dengan *inputs*, *outputs* maupun dengan *outcomes*.

### 4. Implementasi / Pelaksanaan Kebijakan

Tahap ini berkenaan dengan berbagai kegiatan yang akan diarahkan untuk merealisasikan program. Pada tataran ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 2004:59).

Menurut Winarno (2012:146), Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling krusial dalam proses kebijakan publik. Karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, akan muncul pada saat pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekadar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Selain itu, Riant Nugroho juga mengatakan dalam bukunya (2008:436), bahwa perumusan kebijakan (rencana) hanya memiliki porsi 20% keberhasilan, sedangkan implementasi adalah 60%, sedangkan sisanya 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Itu artinya, implementasi adalah proses yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utamanya adalah konsistensi implementasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut van Meter dan van Horn (dalam Suharno, 2013:176-177) menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu; Standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor dan kondisi lingkungan, sosial, politik ekonomi.

## 5. Penilaian dan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2012:229). Sedangkan menurut Jones (dalam Winarno, 2012:229) mendefinisikan secara singkat proses evaluasi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson dalam Winarno, 2012:229).

## 2.2 Pengendalian Penduduk

Miswani Syuaib (2011:3) Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis seperti Indonesia selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Menurut UU No. 52 tahun 2009 Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, Kependudukan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hal yang ikhwal, yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan penduduk setempat.

Sehingga dari pengertian penduduk di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah orang-orang atau orang Indonesia yang berdomisili didalam suatu wilayah atau negara selama enam bulan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Emile Durkheim (dalam Mantra, 2009) menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ia mengatakan, pada suatu wilayah dimana angka kepadatan penduduknya tinggi akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Beberapa faktor demografi yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk adalah:

- a. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang perempuan atau kelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi lahir hidup. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan dan reproduksi manusia. Tinggi rendahnya kelahiran erat hubungannya dan tergantung pada struktur umur, tingkat pendidikan, tingkat perkawinan, penggunaan alat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrasepsi, aborsi, tingkat kelahiran, tingkat pendidikan, status pekerjaan, serta pembangunan.

- b. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Dan kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program kebijakan kependudukan.
- c. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap disuatu tempat ketempat lainnya, melampaui batas Politik/Negara batas dalam suatu negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk

Lembaga Demografi (2016:261) mengartikan Kebijakan kependudukan adalah langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum lain dengan jalan memengaruhi variabel-variabel demografi, yaitu besaran penduduk dan pertumbuhannya.

Sesuai dengan Undang-Undang No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga, Kebijakan Kependudukan dapat dibedakan menjadi dua tujuan. Pertama, kebijakan untuk mengendalikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan penduduk. Kedua, kebijakan yang bertujuan pada perbaikan tingkat sosial dan ekonomi, seperti pengaturan migrasi, kebijakan pelayanan terhadap penduduk usia lanjut, serta kebijakan- kebijakan berkualitas yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi.

Kebijakan kependudukan yang memengaruhi variabel kependudukan adalah Keluarga Berencana di Indonesia. Melalui program ini, jumlah kelahiran di Indonesia diharapkan dapat di kontrol sehingga jumlah penduduk Indonesia yang demikian banyak dapat ditekan pertumbuhannya (Riswanto,1996:19).

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. pengendalian pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan karena terjadinya suatu pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, yaitu karena tingginya angka kelahiran di sebuah negara serta kurang berhasilnya program KB yang di usung oleh pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam Undang undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, serta 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).

Sesuai amanat Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Sedangkan untuk kelembagaan di Kabupaten/Kota tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan langkah konkrit untuk mengatasi rentang kendali manajemen pelayanan program KB antara pemerintah dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah khususnya di Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya dapat berjalan dengan baik apabila di dukung dengan peningkatan kualitas pelayanan pengendalian penduduk dan KB kepada masyarakat, yang diindikasikan dengan adanya keberpihakan ketersediaan infrastruktur instrumen regulasi yang mendukung penyelenggaraan program, penempatan Tenaga Penyuluh dan Pelayanan KB, rancang bangun program yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada) yang tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah - Keluarga Berencana (RKA SKPD-KB). (Renstra BKKBN, 2015:4)

## 2.3 Program Keluarga Berencana

### 2.3.1. Pengertian Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur jarak kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. (Mardiyanto, 2017). Selain itu Menurut UU No. 52 tahun 2009 Keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa KB adalah upaya manusia untuk mengatur atau membatasi kelahiran, mengatur jarak kehamilan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

#### 2.3.2. Tujuan Program Keluarga Berencana

Tujuan KB secara umum yakni membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga, dengan cara pengaturan kelahiran anak diperoleh suatu keluarga yang kecil dan bahagia. Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi. (Sulistyawati, 2012:13)

Tujuan khusus program keluarga berencana yaitu meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan. Melalui KB diharapkan masyarakat dapat lebih terjamin dalam kesejahteraan hidupnya.

#### 2.3.3. Sasaran Program Keluarga Berencana

Sasaran program KB dibagi menjadi 2 yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Sasaran langsungnya adalah pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan alat kontrasepsi secara berkelanjutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**A. Pasangan Usia Subur**

Pasangan usia subur yaitu pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang umur istrinya antara 15 - 49 tahun, karena kelompok ini merupakan merupakan pasangan yang aktif melakukan hubungan seksual dan setiap kegiatan seksual dapat mengakibatkan kehamilan. PUS diharapkan secara bertahap menjadi peserta keluarga berencana yang aktif sehingga memberi efek langsung terhadap penurunan tingkat fertilitas.

Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita, karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang usianya berada pada periode ini disebut wanita usia subur (WUS), dan apabila memiliki status kawin maka kita dapat menyebutnya sebagai pasangan Usia Subur (PUS).

**B. Aseptor KB**

Menurut Saryono (2010) Aseptor KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi dengan tujuan untuk pencegahan kehamilan baik melalui program maupun nonprogram, Aseptor terbagi menjadi 4 jenis:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Aseptor KB Baru

adalah PUS yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami keguguran atau kelahiran

## 2) Aseptor KB Lama

adalah PUS yang melakukan kunjungan ulang termasuk PUS yang menggunakan alat kontrasepsi kemudian pindah atau ganti cara atau alat lain

## 3) Aseptor KB Aktif

adalah PUS yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi

## 4) Aseptor KB Aktif Kembali

adalah PUS yang telah berhenti menggunakan alat kontrasepsi selama 3 bulan atau lebih yang tidak diselingi kehamilan dan kembali menggunakan alat kontrasepsi baik dengan cara yang sama maupun berganti car

Sedangkan sasaran tidak langsungnya adalah pelaksana dari program KB, dengan tujuan menurunkan tingkat fertilitas melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

## 2.3.4. Metode Kontrasepsi

Pelaksana program KB diperlukan kesadaran dan kemauan dari masyarakat. Dan tugas pemerintah adalah mendorong serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensosialisasikan semua hal mengenai KB. KB sendiri dilakukan dengan metode kontrasepsi, yakni metode yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pembuahan yang akan menyebabkan terjadinya kehidupan baru (kehamilan). Metode kontrasepsi terbagi menjadi metode “mekanik dan kimiawi” juga meliputi cara-cara alami dan sterilisasi. Cara-cara Alamia dapat dilakukan secara alamia tanpa menggunakan alat kontrasepsi seperti: Senggama Terputus, Pantang Berkala, Puasa Penuh, Adapun metode-metode kontrasepsi dengan menggunakan alat bantu seperti: Pil, Suntik, Kondom, IUD, Implan, Diafragma, Penyemprotan, Spermisida, Dan Sterilisasi.

Jadi dapat disimpulkan Bahwa KB adalah upaya yang dilakukan masyarakat secara sadar dalam mengurangi angka kelahiran, dengan tindakan pencegahan dan pembatasan kehamilan dengan menggunakan metode-metode kontrasepsi untuk mencapai tujuan dari program Keluarga Berencana.

#### **2.4 Upaya Kebijakan Keluarga Berencana harus disertai dengan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)**

Dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten/ Kota perlu dilaksanakannya kerjasama yang baik agar terwujudnya konsistensi kebijakan Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga dengan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan;
2. Meningkatkan Kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
3. Meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas; dan
4. Menyediakan data dan informasi keluarga untuk digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 Pasal 18 ayat 3 bahwa upaya kebijakan keluarga berencana harus disertai dengan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi). Yang mana KIE tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Sub sistem komunikasi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dan edukasi yang satu sama lain saling berkaitan, dengan terjadinya perubahan tingkah laku dan praktek KB (Keluarga Berencana).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2010:101) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalah proses yang sangat penting dalam pelayanan KB (Keluarga Berencana). Pengertian komunikasi adalah penyampaian pesan secara langsung/tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan suatu efek. Dalam bidang kesehatan kita mengenal komunikasi kesehatan yaitu usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif masyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi individu maupun komunikasi massa. Sementara informasi adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat (pesan yang disampaikan) dan edukasi adalah proses perubahan perilaku ke arah yang positif.

Menurut Haryono Suyono (1979) Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) adalah suatu sistem komunikasi dimana kepada sasaran disampaikan informasi yang edukatif serta edukasi yang informatif, sedemikian rupa sehingga pada sasaran terjadi proses perubahan pengetahuan, sikap, tingkah laku dan praktek KB (Keluarga Berencana).

Dalam Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dilakukan melalui upaya:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Advokasi dan penggerakan

Advokasi dan penggerakan merupakan upaya pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan KB (Keluarga Berencana) yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

Pelaksanaan Advokasi ditujukan untuk mendukung kebijakan penyelenggaraan Keluarga Berencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimana sasaran pelaksanaan Advokasi ini adalah pemangku dan/atau penentu kebijakan nasional dan daerah.

Pelaksanaan penggerakan dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kontrasepsi Program KB (Keluarga Berencana) melalui pembimbingan, pembinaan, pengarahan serta menggerakkan pihak lain. Penggerakan penyelenggaraan KB (Keluarga Berencana) dilaksanakan melalui mekanisme operasional pelayanan dasar program Pengendalian Penduduk dan KB (Keluarga Berencana).

## b. Konseling

Konseling adalah termasuk komunikasi interpersonal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penyuluh Keluarga Berencana, petugas lapangan Keluarga Berencana, tenaga lain yang terlatih yang telah memiliki sertifikat pelatihan yang terakreditasi. Jenis dan bobot konseling

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diberikan sudah tentu tergantung pada tingkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang telah diterimanya. Konseling dibutuhkan bila seseorang menghadapi suatu masalah yang tidak dapat dipecahkannya sendiri. Konseling dilaksanakan sebelum pelayanan kontrasepsi dan pada saat pelayanan kontrasepsi.

c. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses interaksi timbal balik (tidak satu arah) antara individu/ kelompok/ komunitas yang mendampingi dan individu/ kelompok/ komunitas yang didampingi yang bertujuan memotivasi dan mengorganisir individu/ kelompok/ komunitas dalam mengembangkan sumber daya dan potensi orang yang didampingi dan tidak menimbulkan ketergantungan terhadap orang yang mendampingi (mendorong kemandirian). Pendampingan dilakukan oleh tenaga medis, PLKB, dan tenaga ahli terhadap peserta KB (Keluarga Berencana) untuk memilih metode kontrasepsi pada program KB (Keluarga Berencana).

d. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu cara organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan yang dilakukan dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara berkala kepada peserta Keluarga Berencana untuk menjamin kesehatan dan ketahanan keluarga sebagai peserta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diberikan kepada masyarakat akan menimbulkan minat dan peran serta masyarakat sebagai Peserta KB (Keluarga Berencana) terdiri dari Peserta Keluarga Berencana Baru (PB) adalah Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang baru pertama kali menggunakan metode/alat/cara kontrasespsi dan PUS yang akan kembali menggunakan metode/alat/kontrasepsi setelah atau keguguran disebut Peserta Keluarga Berencana Aktif (PA).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian (Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Fauziah Riska Rahmeina	Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru (Jurnal, 2018).	Kerjasama, Komunikasi, Pembagian Tugas, dan Disiplin kerja Unit Pelaksanaan Program Kampung KB sudah berjalan dengan baik dan juga perlu membenahan. untuk kerjasama dengan lintas sektor belum terjalin dengan baik karena hanya satu instansi yang menjadi mitra kerja dalam program Kampung KB yaitu Dinas Kesehatan. untuk komunikasi ke bagian lini lapangan seperti	Penelitian ini cenderung lebih mengulas koordinasi dari para aparat atau unit-unit pelaksana program Kampung KB dalam mencapai tujuannya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Kecamatan dan Kelurahan masih kurang baik karena kurangnya Advokasi. Rapat antara BKKBN Provinsi Riau dengan Dinas Pengendalian Penduduk Kota Pekanbaru belum teragenda dalam pelaksanaan program Kampung KB	
2	Sukmaniar, Wahyu Saputra, dan Dani Saputra	Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019. (Jurnal, 2018).	Penyebab rendahnya peserta KB aktif adalah pemahaman bahwa banyak anak banyak rezeki, kekhawatiran merasa kesepian jika memiliki sedikit anak, masih berkeinginan mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda, status pekerjaan suami, tidak memahami pentingnya KB, tidak ada alat/cara KB yang sesuai dengan keinginan, dan tidak ada kegiatan/ program KB.	Penelitian ini cenderung mengulas Upaya-upaya yang dilakukan guna Mencapai target Renstra tahun 2015-2019
3	Merita Rahma	Strategi Komunikasi Bidang Advokasi dan KIE Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam mensosialisasi	Advokasi dan KIE di Kampung KB (Keluarga Berencana) di Panggungrejo telah berhasil mengemas pesan yang hendak di sampaikan kepada Publiknya. Terbukti dengan masih bertahannya program kampung KB (Keluarga	Penelitian ini cenderung mengulas pelaksanaan kegiatan Advokasi dan KIE dalam mensosialisasi an program KB

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Greity Juvita Wowiling	kan Program Kampung KB (Keluarga Berencana) di Panggungrejo Kota Pasuruan (Jurnal, 2017)	Berencana) dan masih diterapkan hingga saat ini dan adanya rencana penerapan program kampung KB (Keluarga Berencana) di Daerah Pinggiran lainnya.	
		Komunikasi Informasi Dan Edukasi (KIE) Sebagai Bentuk Sosialisasi Program Keluarga Berencana (KB) di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Manado	Kegiatan KIE yang dilakukan dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana Petugas Lapangan KB menggunakan berbagai pendekatan, mempengaruhi target sasaran PUS dengan jalan mengulang-ulang pesan mengubah pengetahuan, pemikiran, pendapat dan sikap mental target sasaran calon PUS dan PUS. Komunikasi persuasif juga dilakukan PLKB beserta tim merupakan komunikasi yang difokuskan pada perubahan kesadaran atau sikap mental seseorang	Penelitian ini cenderung mengulas Kegiatan KIE dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana di Kelurahan Tingkulu Kecamatan Wanea Manado

## 2.6 Pandangan Islam Terhadap Keluarga Berencana (KB)

Mengenai KB yang kita kenal sekarang ini, terjadi silang pendapat mengenai hukum ber KB di kalangan para ulama diantaranya mereka ada yang membolehkan dan adapula yang melarangnya. Bagi mereka takut punya anak banyak karena tidak bisa menafkahi adalah sebetulnya pengingkaran pada tujuan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mencukupi kebutuhan seluruh mahluknya. Sebab, didalam Qs. At-Thalaq ayat 3 disebutkan bahwa:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ  
بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۳

Artinya : “Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Program KB dianggap sebagai bentuk “pembunuhan” anak karena alasan ekonomis (khawatir tidak bisa menafkahi). Sehingga, jika demikian halnya, program KB bertentangan dengan *dokrin* Al-Quran bahwa kita tidak boleh membunuh anak dengan alasan karena takut kelaparan. Orang-orang yang ber KB dengan alasan ekonomis berarti tidak percaya akan kebenaran ayat itu. Sehingga keluarga berencana bertentangan dengan dokrin tersebut.

Namun, Dalam Al-Quran surat An-Nisa: 9 menyebutkan:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝۹

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping ada yang menolak KB ada beberapa ulama yang membolehkan, diantaranya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya “*Ihyu Ulu Muddin*” dinyatakan, bahwa azal tidak dilarang, dengan alasan karena kesukaran yang dialami si Ibu disebabkan karena terlalu sering melahirkan. Syekh Al-Hariri beliau berpendapat bahwa menjalankan KB bagi perorangan (individu) hukumnya boleh dengan beberapa ketentuan Seperti: Untuk menjarangkan Anak, menghindari penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kumudaratn bila ia mengandung dan melahirkan dapat membawa kematian.

Beberapa Ayat Al-Quran memberikan indikasi. Mengenai Hadist Nabi yang dijadikan dalil untuk KB antara lain adalah sebagai berikut:

Artinya : “Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak. (HR Al-Bukhari dan Muslim Dari Saad Bin Abi Waqqash RA).”

Hadist ini memberikan indikasi petunjuk bahwa faktor kemampuan suami istri untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya hendaknya dijadikan pertimbangan mereka yang ingin menambah jumlah anak. Menurut Masjjuf Zuhdi bahwa hukum menggunakan alat kontrasepsi bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi Sunnah, Wajib, Makruh, Haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan Masyarakat/Negara.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum mubah bila seseorang menggunakan alat kontrasepsi dengan motivasi yang bersifat pribadi, seperti menjarangkan kehamilan/kelahiran. Atau untuk menjaga kesehatan si Ibu, tetapi jika ber KB disamping punya motivasi pribadi juga motivasi yang bersifat kolektif dan Nasional seperti kesejahteraan masyarakat/Negara, maka hukumnya bisa Sunnah atau wajib, tergantung pada keadaan Masyarakat dan Negara, Misalnya kepadatan penduduk, sehingga tidak mampu mendukung kebutuhan hidup penduduknya secara Normal.

Sesungguhnya, apa yang dituju oleh negara di dalam kebijakan atau program dicanangkannya tidak lain adalah kesejahteraan seluruh warga negara, seluruh anak bangsa. Ada diktum fikih, yakni *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi almashlahah* (tindakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan). Dalam bahasa agama, kesejahteraan adalah nama lain dari maslahat (*mashlahah*), yang *nota bene* merupakan cita atau nilai dari syariat (*maqashid al syari'ah*). Terkait program KB, apa yang hendak dicapai sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang sejahtera, kondisi maslahat, bagi seluruh warga negara. Pangaturan dan pengendalian populasi dalam program KB adalah suatu cara yang penting menciptakan kondisi maslahat bagi warga negara. Sebab, masalah populasi adalah mendasar, karena masalah-masalah lain hanya merupakan dampak atau akibat saja dari masalah populasi. Benar sekali, bahwa baik di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada teks yang secara jelas dan terang menyebut soal pengaturan atau kontrol kelahiran, atau tepatnya yang menyinggung program KB. Akan tetapi,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika dicermati, setidaknya jelas ada beberapa teks yang secara substansial mengindikasikan ke arah program KB. Misalnya dalam QS. al-Baqarah, disebutkan tentang keharusan para ibu untuk memberikan ASI sampai bayi berumur dua tahun yang berarti jelas secara tidak langsung menekankan pentingnya mengatur jarak kelahiran. Ada juga hadist yang sangat termasyhur, yakni berkaitan dengan metode azl, yakni cara “kontrasepsi” menumpahkan air mani ataupun sperma di luar liang senggama (di luar vagina). Hadist muttafaq ‘alaih, dari Jabir Ra, katanya: “Kami biasa melakukan azl di zaman Rasul SAW, sedangkan Al-Qur’an masih turun. Kalaupun ada sesuatu yang dilarang berkenaan dengan itu, tentu al-Qur’an akan melarang kami melakukan itu.” Dalam riwayat Muslim, ada tambahan keterangan: “... dan perbuatan itu sampai kepada Nabi SAW, dan beliau tidak melarang kami berbuat begitu.”

jelas menyiratkan kemungkinan upaya atau ikhtiar alamiah manusia untuk tidak menjadikan setiap hubungan seksualnya, sebagai wahana untuk reproduksi. Bahwa sekarang ada metode kontrasepsi yang canggih, itu hanyalah karena soal konteks, yakni bahwa perkembangan sains dan teknologi modern terus berjalan sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern dalam pelayanan kontrasepsi yang praktis, canggih, efektif, dan efisien.

## 2.7 Definisi Konsep

Menurut Singarimbun (2006:34) berpendapat bahwa konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atau dasar generalisasi atas jumlah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep guna untuk menghindari salah pengertian, maka definisi beberapa konsep yang dipakai dalam penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memengaruhi pola kembang biak penduduk kearah angka pertumbuhan Penduduk yang diinginkan, biasanya ditempuh melalui suatu kebijakan pemerintah dibidang kependudukan.

### 2. Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

### 3. Peserta KB Aktif

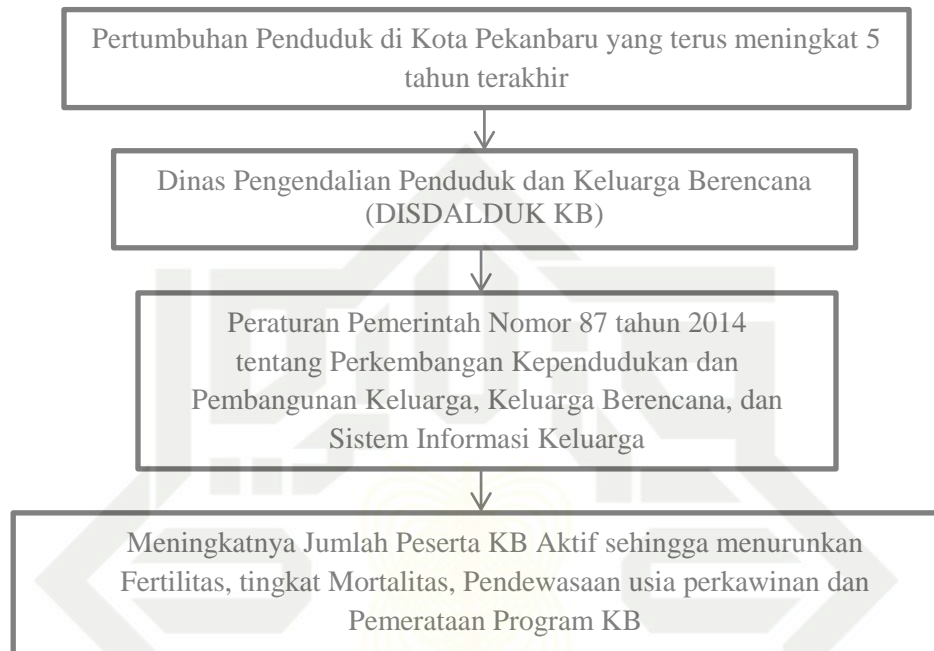
Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang salah seorang diantaranya pada saat ini masih menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.9 Konsep Operasional

**Tabel 2.2**  
**Indikator Penelitian**

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga	1. Advokasi dan Penggerakan	a. Sosialisasi Program KB (Keluarga Berencana) b. Melalui mekanisme operasional pelayanan dasar
	2. Konseling	a. Memfasilitasi pelaksanaan bagi peserta KB (Keluarga Berencana) b. Tenaga Ahli KB c. Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi
	3. Pengawasan	a. Pemantauan Peserta KB (Keluarga Berencana)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan di wilayah dimana lokasi yang dipilih adalah tempat yang mendapatkan atau ikut serta dalam Program Keluarga Berencana Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, karena dengan melihat bahwa Kota Pekanbaru adalah Kota dengan jumlah Penduduk yang terus mengalami pertumbuhan di Provinsi Riau. Serta untuk mempermudah dalam memperoleh data dari Instansi terkait Seperti Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DISALDUK-KB) Kota Pekanbaru berhubungan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Adapun Penelitian ini diadakan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. yaitu observasi berupa pendapat informan tentang kebijakan program Keluarga Berencana berbasis komunikasi serta hasil wawancara dengan informan untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut.

#### b. Data Sekunder

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data yang diperoleh dari referensi semua buku yang menjadi landasan teori dan pembahasan dalam penelitian ini. Tentang permasalahan penelitian dapat diperoleh melalui Jurnal, Koran, Media, dan laporan lain yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2014:188-198) sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Observasi

Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan.

### 2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217).

### 3. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di wawancarai yang mengetahui pasti dan menggunakan Program Keluarga Berencana di Kota Pekanbaru.

## 3.5 Informan Penelitian

Informan (narasumber) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Meleong, 2005:97). Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu dimana peneliti memilih *key informant*, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:



**Table 3.1**  
**Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah (Orang)
1	KASI Advokasi dan Penggerakan	1
2	Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB)	1
3	Pasangan Usia Subur (PUS) sasaran KB Aktif	6
4	Peserta KB Aktif	6
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>

### 3.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan – ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014:60).

Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014 : 246-252) yaitu :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal – hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal – hal yang penting. Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 4.1.1. Sejarah singkat kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai siak. Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.

Dengan Kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.

Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abduk Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser disekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintah Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Sejak ditinggal oleh Sultan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasa Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir, Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

#### 4.1.2. Letak Geografis kota Pekanbaru

##### A. Luas dan Letak Wilayah

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' bujur dan 0°25'-0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari pemukiman laut berkisar antara 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km<sup>2</sup> menjadi 446, 50 km<sup>2</sup> terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan/desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km<sup>2</sup>.

##### B. Batas Wilayah

Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.

## 4.2 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Deskripsi umum tentang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016, yang membahas tentang Tupoksi (Tugas pokok dan fungsi) dari dinas tersebut.

### 4.1.1 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, diketahui bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB (Keluarga Berencana). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, secretariat Dinas dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, membawahi sub bagian umum, sub bagian keuangan. Bidang Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakan, membawahi: seksi Advokasi dan penggerakan, seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB KB (Keluarga Berencana) dan KB (Keluarga Berencana), seksi Pengendalian penduduk dan informasi Keluarga. Bidang KB (Keluarga Berencana) membawahi seksi Distribusi Alokasi, Seksi jaminan Pelayanan KB (Keluarga Berencana), Seksi pembinaan Kesertaan KB (Keluarga Berencana). Bidang ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi : Seksi Pemberdayaan keluarga sejahtera, seksi bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia, seksi Bina Ketahanan Remaja, unit pelaksana teknis (UPT), dan kelompok jabatan fungsional.

#### 4.1.2 Kedudukan

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh KepalaBidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**4.1.3 Susunan Organisasi**

1. Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru terdiri dari :
  - a) Kepala Dinas
  - b) Sekretaris, membawahi :
    - 1) Sub Bagian Umum
    - 2) Sub Bagian Keuangan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
  - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan.
  - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.
  - 3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- d) Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
  - 1) Seksi Distribusi Alokasi
  - 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB.
  - 3) Seksi Pembinaan Kesertaan KB.
- e) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
  - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
  - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
  - 3) Seksi Bina Ketahanan Remaja.
- f) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### 4.1.4 Tugas dan Fungsi

##### A. Kepala Dinas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas pembantuan lainnya.
- 2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi.
  - b. pengelolaan keuangan dinas
  - c. pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - d. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
  - f. penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- i. penyusunan program dan anggaran dinas.
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretariat**

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
  - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
  - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
  - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
  - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
- 4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- a. Sub Bagian Umum, mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
    - i. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
    - ii. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iii. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- iv. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- v. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- vi. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- vii. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- viii. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- ix. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- x. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- xi. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
  - c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
- f. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan
- 2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - c. Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
  - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten/kota.
  - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB).
  - h. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
  - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan.
  - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan KB.
  - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

**D. Bidang Keluarga Berencana**

- 1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan keluarga berencana.
- 2) Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana.
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kabupaten/kota.
- e. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota.
- f. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten/kota.
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana.
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana.
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**E. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- 1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 2) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

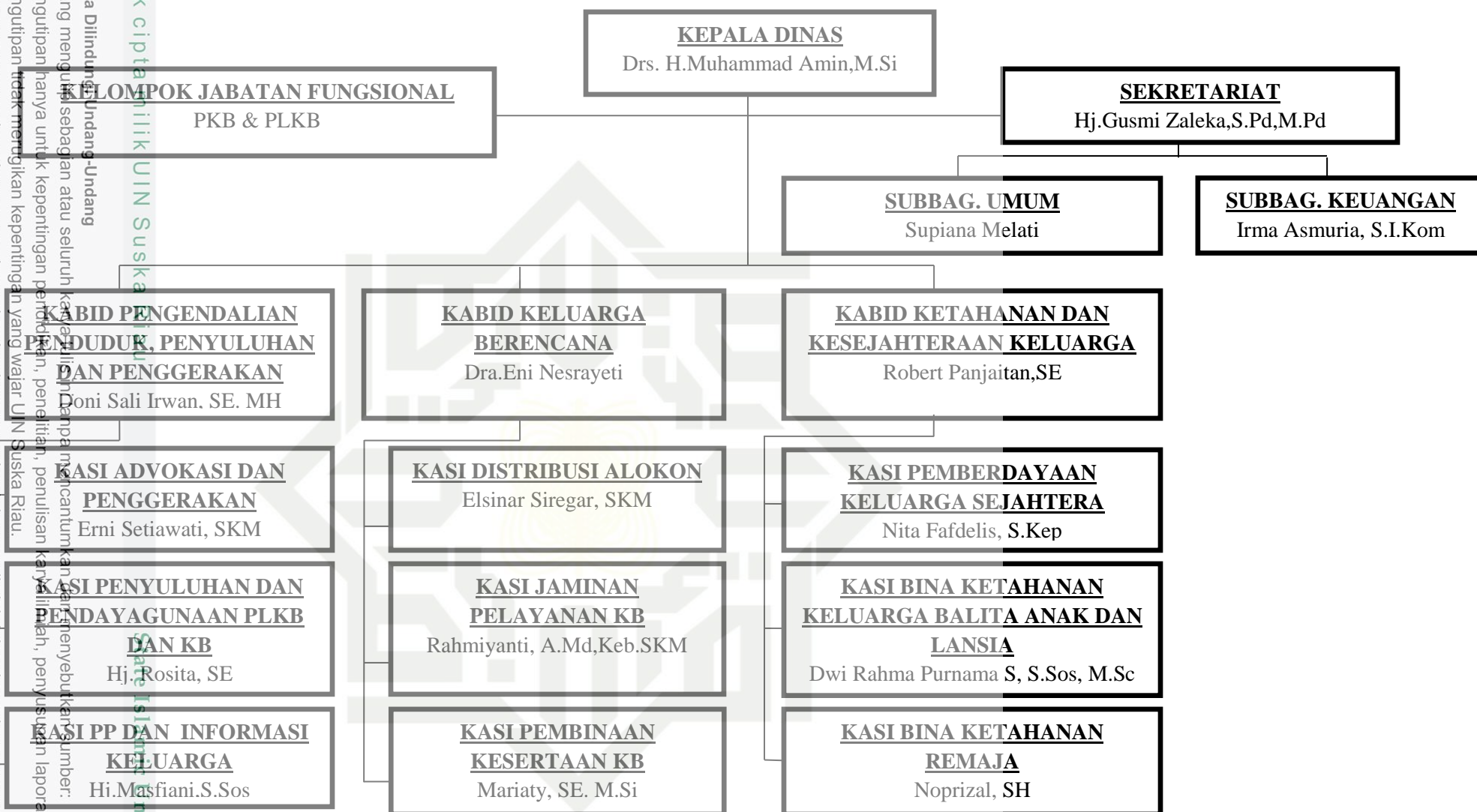
**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita.
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR).
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan.
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- g. pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan mengenai Upaya kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) kota Pekanbaru dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif dapat diambil kesimpulannya terhadap pelaksanaan yang diberikan pada masyarakat kota Pekanbaru, hal ini dapat dilihat dari

1. Upaya kebijakan keluarga berencana yang harus disertai dengan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Pekanbaru.
  - a. Advokasi dan Penggerakan, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dari segi mekanisme operasional pelayanan dasar telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dan ketetapan dari Peraturan Pemerintah. serta dari segi menggerakkan pihak lain telah terlaksana dengan baik dapat dibuktikan adanya kerja sama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Kesehatan juga rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah-daerah yang membantu jalannya penggerakan program keluarga Berencana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Konseling yang dilakukan dari segi melakukan sosialisasi telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana namun masih terdapat masyarakat yang belum merasakan sosialisasi di daerah mereka, dapat dibuktikan kurangnya partisipasi dan minat masyarakat untuk menggunakan kontrasepsi dan menjadi peserta KB Aktif, dalam pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi lebih luas dan jelas. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan media informasi yang belum memadai.
2. Kendala – Kendala mengenai kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DISDALDUK-KB) kota Pekanbaru dalam meningkatkan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif adalah
  - a. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kepercayaan masyarakat pada istilah ‘banyak anak banyak rezeki, dan adanya pemahaman tentang dampak negatif dari penggunaan KB masih menjadi kendala untuk memaksimalkan program KB. sosialisasi yang dilakukan oleh DISDALDUK-KB Kota Pekanbaru melalui KIE baik secara tatap wajah langsung maupun melalui media masih perlu dilakukan secara optimal dan merata ke daerah-daerah yang ada di kota Pekanbaru. disamping itu adanya keterbatasan waktu untuk mengikuti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosialisasi dibeberapa kalangan masyarakat menjadi kendala dalam program keluarga berencana.

- b. Penguasaan materi tenaga penyuluh yang masih terbatas pelaksanaan KIE KB yang dilakukan oleh PKB / PLKB masih belum maksimal, Hal ini dibuktikan Penguasaan materi yang masih kurang untuk menjawab pertanyaan dan keluhan masyarakat di kota Pekanbaru. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk menyelenggarakan program keluarga berencana dalam meningkatkan peserta KB Aktif yaitu tenaga ahli seperti PKB/PLKB melalui berbagai pelatihan atau pembinaan.

**6.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka saran – saran yang disampaikan Penulis kepada Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pelaksanaan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada program Keluarga Berencana dengan menyediakan informasi media massa yang dapat diakses oleh umum dalam mendapatkan informasi yang luas dan jelas sehingga pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan kontrasepsi yang sesuai kebutuhan, norma, agama, kesehatan dan adat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya website resmi dari DISDALDUK-KB Kota Pekanbaru yang berisikan edukasi baik tentang Program KB, Kontrasepsi, maupun pembangunan keluarga sejahtera.

2. Meningkatkan pelatihan khusus terutama Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk menghadapi karakteristik PUS yang berbeda-beda. Petugas diharapkan mampu merangkul PUS yang sulit mengambil keputusan untuk ikut serta dalam Program KB
3. Sosialisasi dan pelatihan tentang alat KB kepada PUS terus di kampanyekan, baik secara langsung mendatangi rumah-rumah maupun acara formal dan semiformal
4. Terus melakukan koordinasi antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan pihak lain untuk mengatasi kendala –kendala yang dihadapi pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB secara bersama – sama untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap Program KB. Sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi angka kematian ibu, angka kematian bayi dan tetap menjaga kesehatan reproduksi peserta Keluarga Berencana





## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Anggara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan strategi komunikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Demografi, Lembaga. 2016. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herujito, Yayat M. 2001. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Mantra, Ida Bagoes. 2015. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukani, Miswani Syuaib. 2011. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Makassar: Alauddin University Press.
- Moloeng, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2015. *Teori komunikasi individu hingga massa*. Jakarta : Prenadamedia
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Basalom, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta. Peraturan Perundangan – Undang.
- Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.
- Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Cet. II; Jakarta: Salemba Medika. 2012.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Trasnparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Waharno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: C A P S.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019*. (Diakses 16 Agustus 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Kepala BKKBN RI No. 2 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana

Peraturan Walikota Nomor 105 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Desiyani, Nathalia Yaku Ndanga. 2016. *Analisa Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Berencana*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol 5 No 3

Sukmanar, Wahyu Saputra, dan Dani Saputra. 2018. *Upaya Peningkatan Peserta KB Aktif dalam rangka Pencapaian Target Renstra BKKBN 2015-2019*.

Sukardi. 2018. *Audit Komunikasi Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat*. Jurnal Komunikasi AREBA. Vol 7. No 2

Suliasi, Abd, Kadir Adys, Nasrul Haq. 2018. *Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 4 No 1

Rosa Pasrah S.D, Tri Sukirno, dan Putro Toti Indrawati. 2014. *Efektivitas program keluarga Berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru*.



Fauziah Riska Rahmeina. 2018. *Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru*

Mardiyanto. 2017. *Pemberdayaan Keluarga Melalui Kampung KB Dalam Upaya Peningkatan Program KKBPK Dan Terkait Di Jawa Timur*. Jurnal Keluarga. Vol 2. No 1.

© HAK CIPTA milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

HAK CIPTA Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0781) 39064 Fax. (0781) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/33335  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : UIN/WF.II/PP.00.9/2106/2020 Tanggal 18 Juni 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

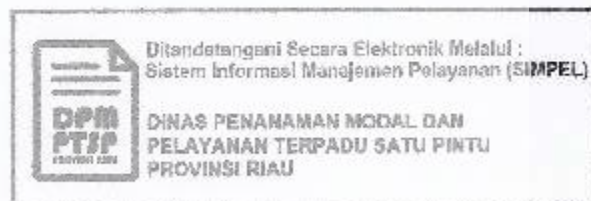
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | TASYA DWI ATMA   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11675202550  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISDALDUK-KB) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) AKTIF |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Juni 2020



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/E.VII/PP.00.9/2106/2020  
: Biasa  
: -  
: Izin Riset

Pekanbaru, 18 Juni 2020 M  
26 Syawwal 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

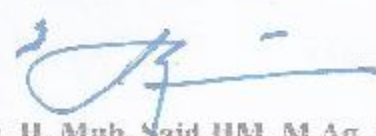
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tasya Dwi Atma  
NIM : 11675202550  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
(DISDALDUK-KB) Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Peserta Keluarga  
Berencana (KB) Aktif " Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/1442



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Merimbang

: Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33335 tanggal 24 Juni 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama

TASYA DWI ATMA

2. NIM

11675202550

3. Fakultas

EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU

4. Jurusan

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

5. Jenjang

S1

6. Alamat

JL. MELUR KOMPLEK SENTOSA NO. 4

7. Judul Penelitian

ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISDALDUK-KB) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) AKTIF

8. Lokasi Penelitian

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Juni 2020

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

RONI MAHENDRA, S.ST

Penata Tingkat I

NIP. 197 50315 199803 1 005

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**Tasya Dwi Atma**, Lahir di Pekanbaru

pada tanggal 09 Januari 1999. Anak kedua dari Empat Bersaudara, dari pasangan ayahanda, Yen Helfi dan Ibu Nurti Elisna. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 028 Tampan, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 08 Pekanbaru 2013,

Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 04 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **ANALISIS KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DISDALDUK-KB) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB)**.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 10 Agustus 2020 jurusan Adminstrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).